

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Timor-Leste merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dan telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif dan tiga kali pemilihan presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan secara langsung. Berlangsungnya pemilu ini menjadi semakin sering karena dengan ditetapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung maka gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pun juga dipilih secara langsung melalui pemilu. Seiring dengan penyelenggaraan pemilu baik untuk pemilihan kepala daerah, anggota legislatif maupun untuk pemilihan presiden ternyata permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu pun kerap terjadi. Permasalahan dalam pemilu sangat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawa ke ranah hukum dan menjadi perselisihan hasil pemilihan umum. Banyaknya perselisihan dalam pemilu di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi :

1. Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. Banyak terjadi kasus penduduk yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam daftar pemilih, dan sebaliknya penduduk asli yang telah berdomisili lama di suatu desa ternyata tidak tercatat dalam daftar pemilih, atau sangat mungkin seorang pemilih tercatat sebagai daftar pemilih pada lebih dari suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan ini muncul karena sistem informasi kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Fenomena penggunaan

kartu identitas ganda juga menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu. Keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara sehingga dapat menjadi sarana untuk menang dalam pemilu.

2. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang melakukan kesalahan dalam memberi tanda pada kertas suara akhirnya banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah.
3. Proses pengumpulan surat suara yang berjalan lambat, karena perbedaan kecepatan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing daerah. Hal ini ditambah dengan kondisi geografis negara kita yang heterogen sehingga dapat menghambat distribusi surat suara.
4. Proses penghitungan suara yang dilakukan di setiap daerah juga berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua surat suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara.
5. Keterlambatan proses pengiriman hasil perhitungan suara. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi di daerah. Oleh karena itu, seringkali pusat tabulasi harus menunggu data penghitungan yang dikirimkan dari daerah dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari hal tersebut, maka pengumuman hasil pemilu akan memakan waktu yang lama.
6. Sangat mungkin terjadi “jual beli” surat suara demi untuk kepentingan partai tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terselubung.

Pemilihan umum di Timor Leste masih dilakukan secara manual, yaitu warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan berlangsung. Mereka mencoblos atau mencontreng kertas suara kemudian memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses penghitungan suara. Proses pemungutan suara di Timor Leste masih dilakukan dengan metode konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan secara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.

Teknologi e-voting dapat menjadi pilihan yang baik untuk saat ini dalam menjalankan salah satu pilar utama demokrasi yaitu pemilihan umum. Apalagi terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapan secara konvensional seperti selama ini, pemilu konvensional kurang berhasil menjawab harapan masyarakat terutama pemilih terhadap mekanisme pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang didapat adalah bagaimana mengimplementasikan atau memanfaatkan teknologi informasi dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Timor-Leste

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sistem informasi pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Timor Leste yang dibangun berbasis web.
2. Fitur pada aplikasi meliputi pendataan calon kepala daerah, pendataan pemilih, perhitungan suara

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengimplementasikan atau memanfaatkan teknologi dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA).
2. Dapat membuat sebuah sistem informasi untuk pemilihan umum kepala daerah.
3. Dapat membantu kegiatan demokrasi sebuah negara

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa manfaat yang di dapat dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk membantu kegiatan demokrasi negara Timor leste.
2. Dapat mempermudah proses pencalonan kepala daerah dan pencoblosan.
3. Dapat mempermudah proses perhitungan suara

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Berisikan tinjauan pustaka dan dasar teori yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan setiap langkah eksperimen yang dilakukan dalam penelitian menggunakan bentuk kalimat pasif.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang implementasi sistem yang dianggap penting atau inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan dan berdasarkan tools atau bahasa pemrograman yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Berisi hasil dari penelitian yang menjawab masalah dan tujuan serta keunggulan dan kelemahan sistem mengacu pada produk lain.